



# KELEMBAGAAN DALAM KERANGKA KELAUTAN/KEMARITIMAN



**Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**

**Jakarta, 12 September 2014**

# ISU PENANGANAN URUSAN KELAUTAN



Penetapan garis batas wilayah teritorial laut Indonesia dengan negara tetangga



Pengawasan dan Keamanan Laut



Daya saing pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut dengan negara lain

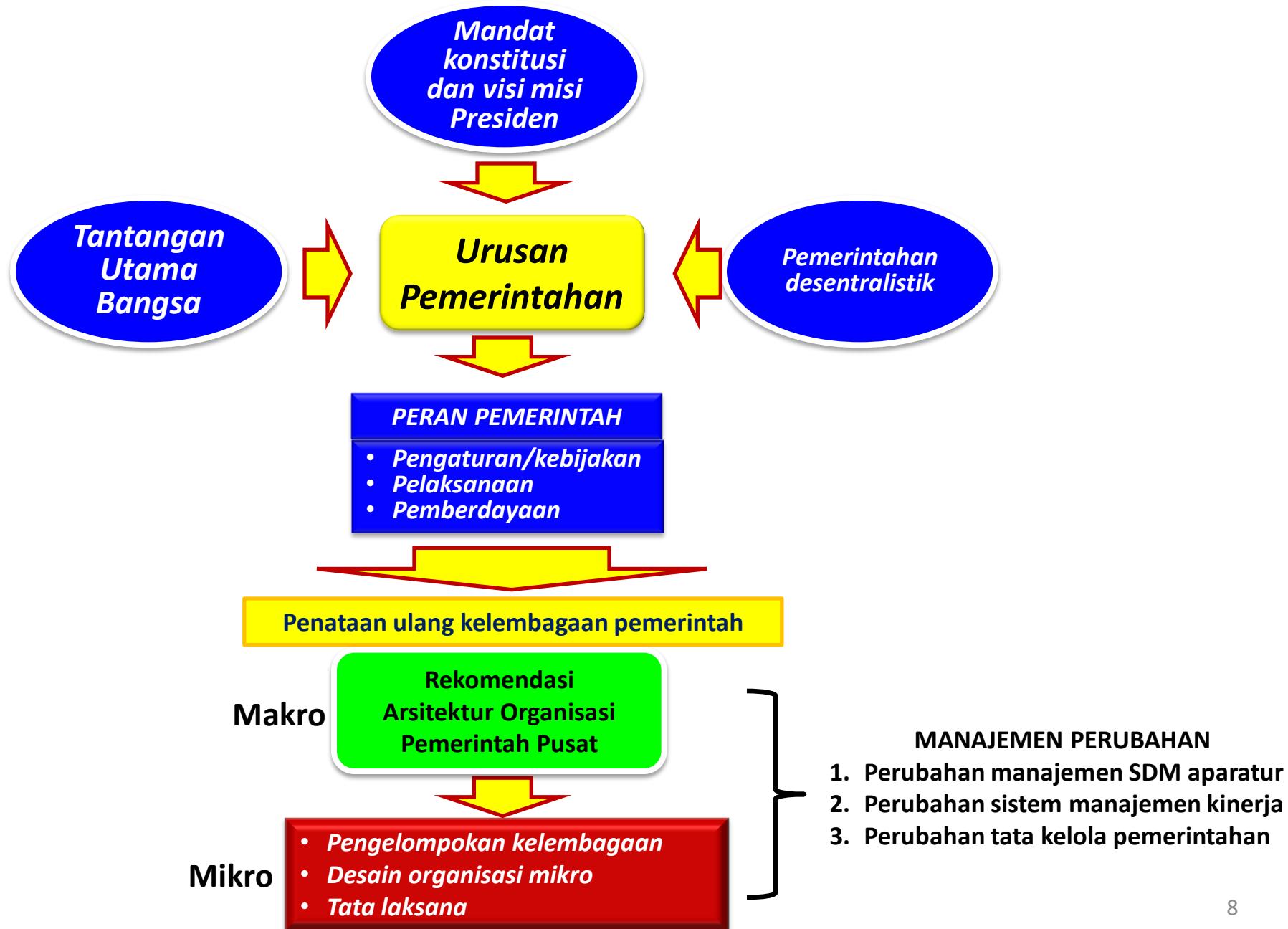


Kesenjangan ekonomi antara daratan utama dan pulau-pulau kecil

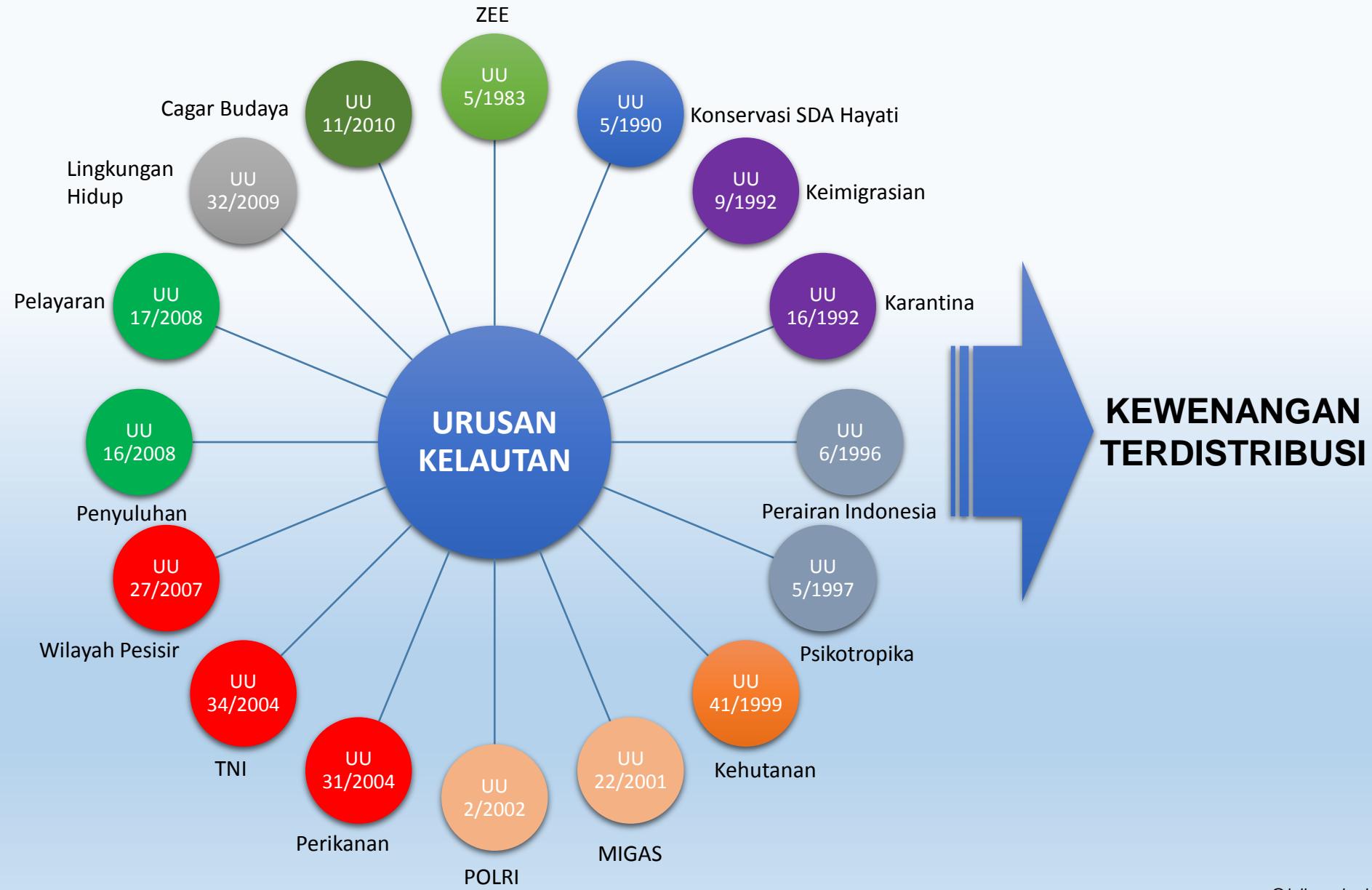


Dampak perubahan iklim

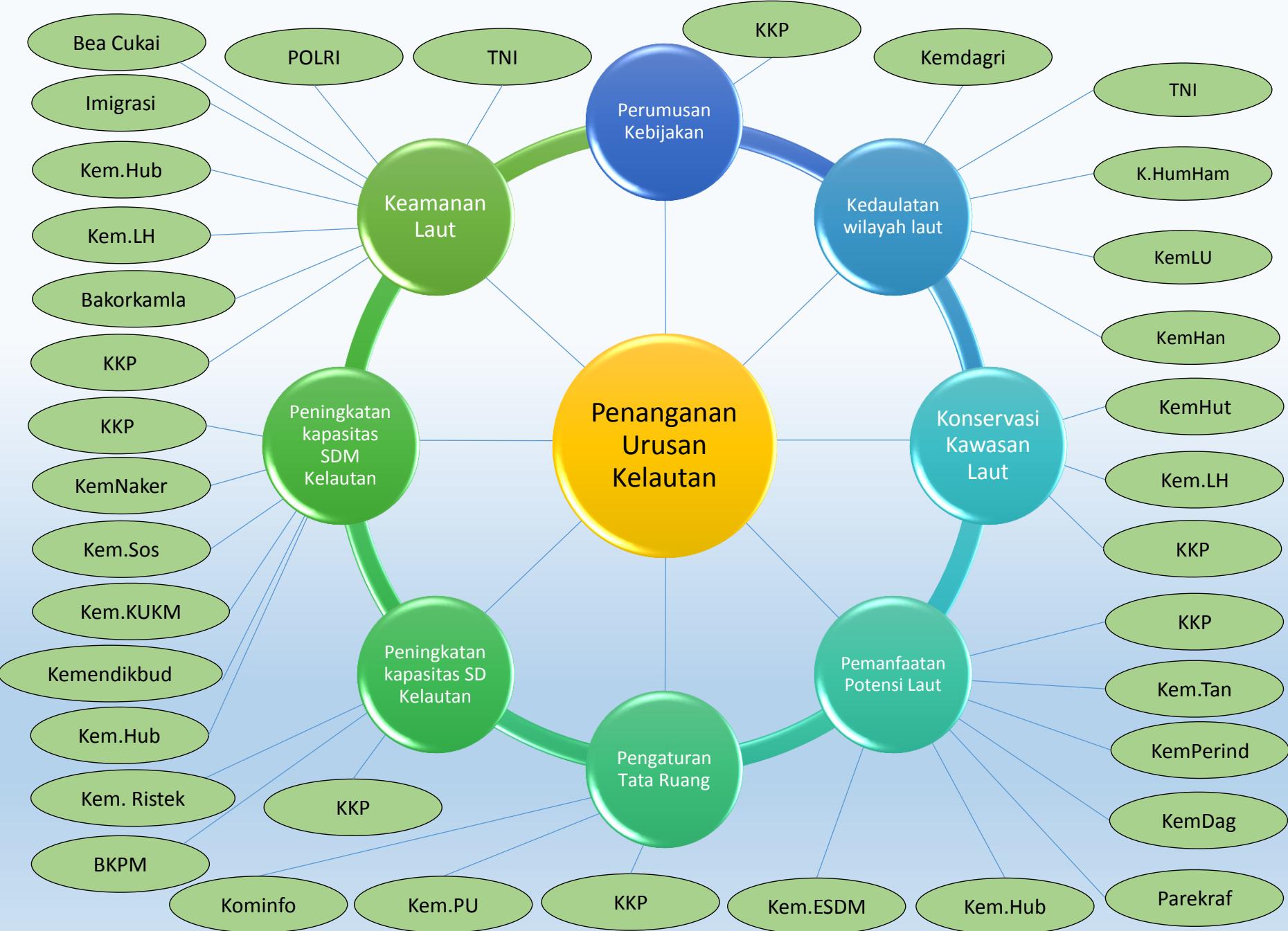
# POLA PIKIR PENATAAN KELEMBAGAAN SEBAGAI *DELIVERY MECHANISM*



# UNDANG-UNDANG TERKAIT URUSAN KELAUTAN



# PENANGANAN URUSAN KELAUTAN YANG TERFRAGMENTASI



# Fokus Reformasi Bidang Kelembagaan

Kondisi saat ini

Fragmented  
Organization

Kondisi diharapkan

Consolidated  
Organization



- Prioritas Nasional (RPJP/RPJMN/MP3EI)
- Visi dan Misi Presiden Terpilih

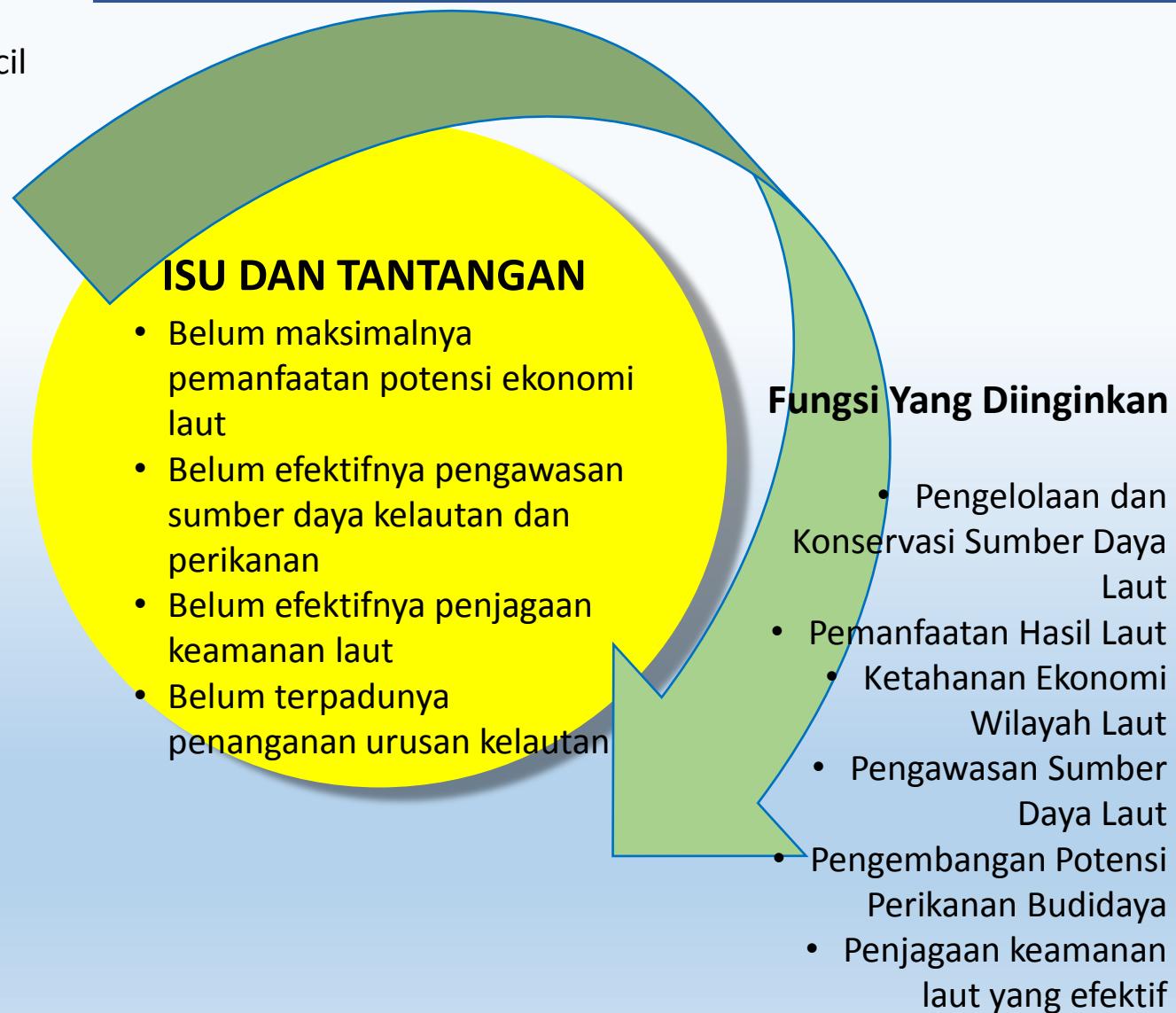
# FOKUS BIDANG PEMBANGUNAN SESUAI RPJMN 2015-2019



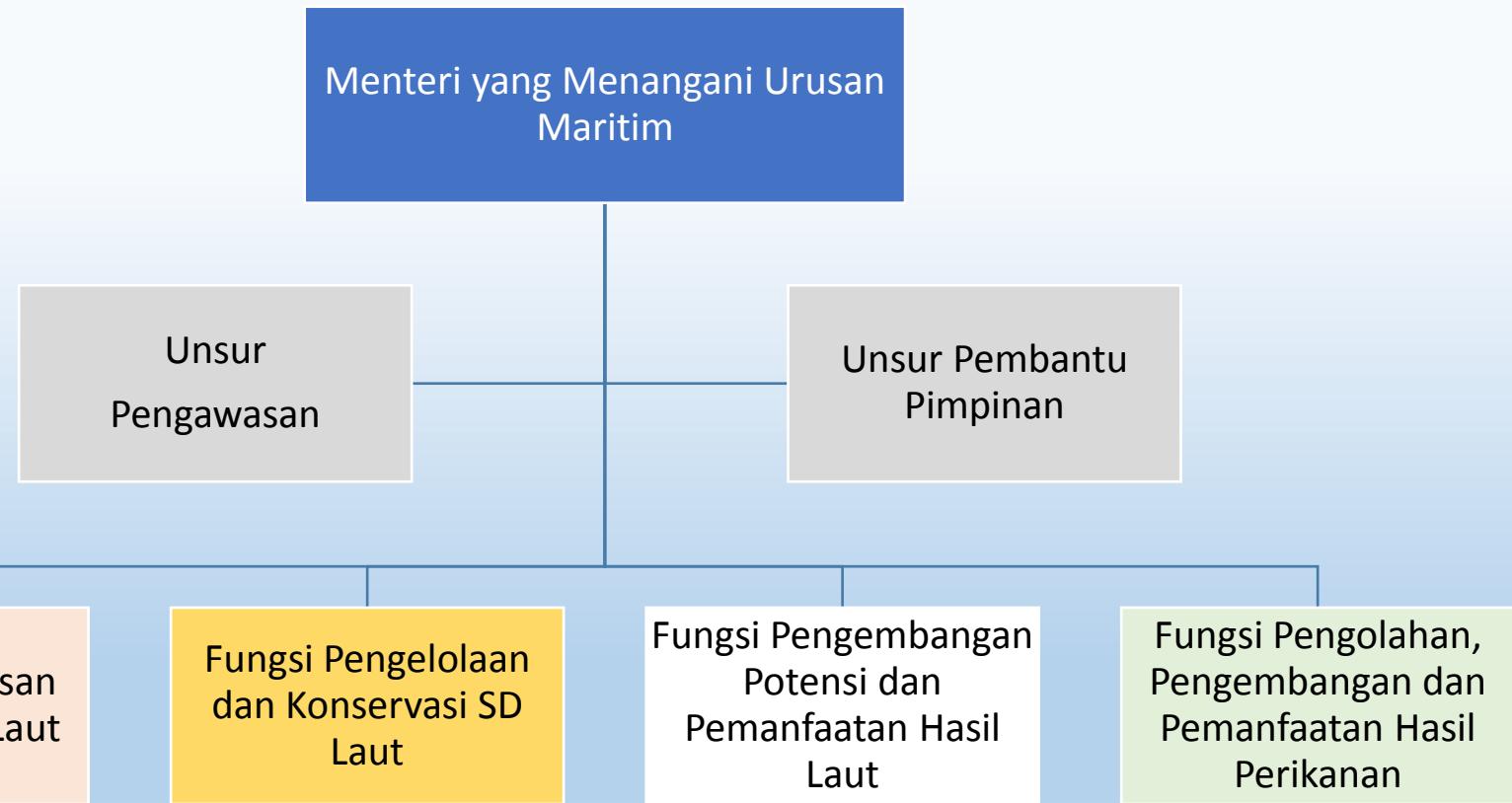
# Konsolidasi Penanganan Urusan Kelautan

## Fungsi Saat Ini

- Kelautan (KKP)
- Pesisir dan Pulau-pulau kecil (KKP)
- Perikanan (KKP)
- Sumber daya laut (KKP)
- Keamanan Laut (KKP, Bakorkamla, TNI, POLRI)
- Konservasi Kawasan Laut (KKP, Kem.Hut, Kem.LH)
- Pelayaran (Kem.Hub)
- Cagar Budaya bawah laut (Kem.Dikbud)



# Rekomendasi Struktur Organisasi terhadap Kementerian yang Menangani Urusan Maritim



**TERIMA KASIH**